



Prosiding Seminar Nasional

Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Kamis, 6 Oktober 2016

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jamaris, dkk

ISBN 978-602-60486-0-8

Diterbitkan oleh:
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang



KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

Padang, 6 Oktober 2016

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**DITERBITKAN OLEH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Padang, 6 Oktober 2016**

**DITERBITKAN OLEH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan Luar Sekolah 2016
Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Penulis, Jamaris, dkk.
Editor, Syafruddin Wahid
Padang, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (2016)
x & 257 hlm; 15,5 x 23 cm

Copyright@2016
by Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Cetakan pertama, Oktober 2016

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar,
Air Tawar Barat, Padang Utara, Padang
Sumatera Barat

ISBN 978-602-60486-0-8

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga prosiding hasil Seminar Nasional Pendidikan Luar Sekolah 2016 dapat terselesaikan.

Target pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh komponen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat desa. Terkait itu, pemerintah melalui Kementerian Desa PDT mengonsep adanya tenaga pendamping desa. Pendampingan Desa merupakan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi pendampingan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar masyarakat (*community learning process*).

Para tenaga pendamping profesional bertugas untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan UU tentang Desa dan mendampingi masyarakat dalam peningkatan daya tawar untuk mengakses sumberdaya lokal yang dibutuhkan demi kepentingan pembangunan. Pendampingan dilakukan sebagai proses penguatan (*empowering society*) sebagai masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (*self governing community*), dan bukan berbasis pada mobilisasi partisipasi masyarakat yang lebih bersifat *top down*.

Demi upaya mewujudkan desa sebagai *self governing community*, para tenaga profesional Pendamping Desa diarahkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk mampu mengorganisir dan mengkonsolidasikan seluruh potensi yang selanjutnya akan direkrut, dilatih dan dibentuk menjadi kader-kader desa.

Prosiding ini disusun sebagai tindak lanjut kegiatan seminar yang telah dilaksanakan pada Oktober 2016. Seminar diikuti oleh peserta baik peneliti, dosen, praktisi maupun pemerhati pendidikan. Partisipasi aktif dari semua stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada sinergi kinerja di bidang pendidikan luar sekolah. Semua makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui peer review.

Materi prosiding dikelompokkan berdasarkan bidang kajian. Pengelompokkan berdasarkan bidang ini mungkin tidak dapat dilakukan secara tepat karena keterkaitan antar bidang ilmu dalam beberapa makalah, namun redaksi mengelompokkan berdasarkan dominasi kandungannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar dan penyusunan prosiding ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pembangunan pendidikan luar sekolah di Indonesia.

Padang, Oktober 2016
Redaksi

DAFTAR ISI

PENYIAPAN SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI TENAGA PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

1. **PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSI
PENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA** oleh
Jamaris (Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri
Padang) 1
2. **SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN
PEMBANGUNAN NAGARI** oleh Syafruddin Wahid (Dosen
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang) 17
3. **PERAN STRATEGIS SARJANA PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH DALAM Mendukung PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA** oleh Ismaniar (Dosen Jurusan
Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Padang) 42
4. **PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh
Alim Harun Pamungkas (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 51

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

5. **PENGUATAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA** oleh Syur'aini
(Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang) 63
6. **PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
KOMPETENSI PENDAMPING PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA** oleh Dayat Hidayat (Dosen Program
Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Singaperbangsa
Karawang) 73
7. **PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL** 88

BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN oleh Wirdatul Aini (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	
8. PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYA PENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PROGRAM PENDAMPINGAN DESA oleh Muhaimin (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang)	97
9. PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN oleh Iswandi (Dosen STKIP YPM Bangko Jambi)	105
10. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI MASYARAKAT DESA oleh Elfi Rahmi (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas)	116
PRESPEKTIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	
11. MEMAHAMI MASYARAKAT SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL oleh Setiawati (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	125
12. SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKAN <i>SELF GOVERNING COMMUNITY</i> DI SUMATERA BARAT oleh MHD. Natsir (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	135
13. PROCESSING WASTE INTO ORGANIC FERTILIZER FOR THE GROUP OF FARMERS IN BLOOMING SAIYO KENEGARIAN TANJUNG BALIT THE DISTRICT X KOTO DISTRICT SOLOK oleh Siti Farida F & Mas'ula (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	144

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

14. **PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL AGEN PERUBAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KASUS DESA PALEM KAB. KEDIRI DAN DUSUN BAJULMATI KAB. MALANG)** oleh Zulkarnain (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang) 150
15. **PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAH SATU MITIGASI BENCANA** oleh Vevi Sunarti (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 166
16. **PERAN PENDAMPING DESA DALAM RELOKASI KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG** oleh Mahfuzi Irwan (Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta) 183
17. **PENDAMPING DESA SEBAGAI PENGGERAK PEMBERDAYAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** oleh Marta Dwi Ningrum (Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta) 198

KOMPETENSI TENAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18. **URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR DALAM PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh Tasril Bartin (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 210
19. **PEMUDA SEBAGAI FASILITATOR PENDAMPING DESA** oleh Syamsuddin (Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Nonfomal Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta) 225

KONSEP PEMBELAJARAN

20. PERAN GURU PROFESIONAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN oleh Darnis Arief (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	238
--	-----

PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PEDESAAN BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Wirdatul 'Aini

Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis lokalitas sangat cocok diterapkan pada era otonomi saat ini. Pembangunan ekonomi yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi perangsang terciptanya peluang kerja dan ragam kegiatan perekonomian baru. Namun demikian, kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah. Seragamnya pembangunan ekonomi di hampir banyak wilayah menjadikan pembangunan tidak tepat sasaran. Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakter dari daerah tersebut.

Daerah dipahami sebagai struktur dan karakter kewilayahan yang terbagi dari kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, hingga dusun merupakan bentangan kategorisasi daerah yang sejatinya memiliki keragaman potensi sumber daya. Keragaman ini semestinya dikenali sebagai variabel pembeda pembangunan perekonomian masyarakat. Kekhasan daerah mestinya pula melahirkan keunikan produksi ekonomi masyarakat.

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan mestinya merupakan sebuah pendekatan perekonomian yang menghubungkan distribusi hasil produksi desa dengan sistem ekonomi pasar untuk memacu kegiatan ekonomi yang berada di desa. Pengembangan tersebut dicapai dengan berfokus pada distribusi peluang produk pedesaan untuk memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja dan peluang usaha, serta memunculkan strategi untuk menjaga agar sebagian besar peluang untuk memperoleh pendapatan tetap berada di desa.

Pengembangan ekonomi pedesaan dilakukan tanpa kemauan politik dan dukungan pemerintah, baik dalam menjamin kebijakan yang akomodatif maupun prioritas sumberdaya yang menyangkut

sektor infrastruktur dan dukungan sektor jasa. Selain pihak pemerintah, terdapat *stakeholder* lain yang sepatutnya menjadi bagian dari skema pengembangan ekonomi desa adalah pihak swasta.

B. PEMBAHASAN

1. Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan

Sebagai sebuah proses multidimensi melalui integrasi perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, pembangunan ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat (Todaro, 2000). Secara filosofis, pembangunan diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan beragam alternatif humanis untuk pencapaian aspirasi masyarakat (Rustiadi, 2006).

Terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan ekonomi pada suatu kawasan yaitu, (1) membuka kesempatan kerja yang berkualitas bagi penduduk, (2) mencapai situasi perekonomian yang stabil, dan (3) membangun beragam basis ekonomi dan kesempatan kerja (Jamli, 2003). Artinya, desa harus mengenal dengan baik potensi yang dimilikinya, serta memberdayakan berbagai sumber daya tersebut sebagai dasar dalam pembangunannya. Dengan demikian, perekonomian pedesaan selayaknya memperhatikan antara lain kondisi ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan sumber daya insani, serta infrastruktur yang tersedia untuk mencapai serangkaian tujuan yang ditetapkan.

Berdasar pada pertimbangan aspek-aspek tersebut, selanjutnya disusun perencanaan pembangunan kawasan pedesaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan tersebut menekankan pada pembangunan berbasis sumber daya lokal potensial untuk menciptakan peluang pekerjaan dan memacu kegiatan perekonomian baru berbasis lokal (Blakely, 1994). Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang saling berkaitan, yaitu penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan terwujudnya mata rantai kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Dendi, 2004).

Dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi di kawasan pedesaan, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan, diantaranya seperti yang direkomendasikan oleh Anton (2008) yaitu peningkatan kemampuan produsen di kawasan pedesaan, agar mampu

bersaing dengan produk yang berasal dari luar kawasan pedesaan yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas produksi dan memperbesar peluang distribusi keluar hasil produksi.

Kedua, memperbaiki kerjasama antar *stakeholder* agar dapat saling mendukung dan memperkuat proses produksi serta distribusi. Ketiga, mengalokasikan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang berpotensi untuk berkembang, akan tetapi tidak lantas melupakan kelompok lainnya yang masih berkembang, serta membuat suatu pusat perdagangan sebagai media interaksi antar kelompok usaha dengan pasar.

Keberhasilan proses pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan, hendaknya memperhatikan komponen-komponen pendukung. Komponen lingkungan (*environment*) ataupun komponen infrastruktur (*instrument*) desa memiliki peran dalam pencapaian tujuan pengembangan perekonomian yang diharapkan.

Investasi di bidang infrastruktur berperan besar dalam mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan (Anton, 2008). Perlu diperhatikan mengenai penentuan jenis infrastruktur yang akan disiapkan, karena harus berorientasi pada karakteristik dan kebutuhan desa. Sedangkan kondisi lingkungan adalah perangkat yang mendukung mudahnya proses, seperti peraturan, prosedur, pajak, dan pungutan biaya.

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan berperan penting dalam memperkuat posisi produsen (produksi barang/jasa). Fokus pengembangan ditujukan pada pembentukan basis kolektif masyarakat, misal penguatan kapasitas organisasi. Peningkatan keterampilan dan kapasitas produsen, serta penyiapan sarana keterlibatan produsen dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan.

Produsen merupakan kelompok yang paling lemah dan memerlukan dukungan untuk menyuarakan kepentingan mereka maupun untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mengorganisir para produsen ke dalam sebuah kelompok hanyalah merupakan salah satu bagian dari upaya untuk perbaikan. Peningkatan ketrampilan dan kapasitas produsen dalam memproduksi dan menjalankan bisnis serta meningkatkan akses pasar, jauh lebih penting dari itu semua (Boulle et al., 2004).

Kapasitas produsen harus dibangun melalui dua pendekatan. Pertama, kapasitas organisasi agar memiliki suara yang kuat dan jelas dalam kemitraan, dan kedua, pengembangan ketrampilan untuk

menjamin peningkatan produksi dalam klaster yang bersangkutan (Bouille et al., 2004).

Konsep pengembangan ekonomi lokal yang pro-masyarakat miskin mementingkan beberapa prinsip pokok, yakni: (1) investasi pada peningkatan sumber daya manusia dan kapital sosial penduduk miskin; (2) kebijakan dan pelayanan yang menghasilkan tersedianya secara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar masyarakat (akses pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); (3) kebijakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan dan atau nilai tambah dari usaha sendiri; (4) peningkatan akses masyarakat miskin kepada sumber daya ekonomi (modal, lahan, sarana produksi, informasi pasar dan lain-lain); dan (5) pembangunan yang ramah lingkungan (Dendi, dkk.2004).

Dalam kaitannya dengan prinsip pengembangan ekonomi lokal yang *pro-poor*, dalam penentuan komoditas unggulan daerah, disamping kriteria-kriteria kelayakan teknis, permintaan pasar, serta efek *multiplier* suatu komoditi/produk sektoral terhadap sektor usaha lainnya, faktor potensi nilai tambah langsung bagi keluarga miskin juga sebagai kriteria penting (Dendi, 2004: 17).

2. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberdayakan diri dengan memiliki kemampuan/keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh perempuan. Masalah perempuan sering dikaitkan dengan gender. Secara umum gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dari segi sosial-budaya.

Kesetaraan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan yang memerlukan berbagai teknik analisa kesetaraan gender. Analisa kesetaraan gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam budaya negara kita beban gender seorang laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan beban gender seorang perempuan. Oleh karena itu masih banyak masyarakat di negara kita yang tidak mementingkan pendidikan untuk perempuan, disebabkan mereka masih menyakini bahwa perempuan tugasnya hanya mengurus rumah, anak, dan suami mereka, tanpa memberi kesempatan kepada perempuan bekerja di luar rumah seperti halnya laki-laki.

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menentukan kekuasaan dan status pun laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal itu disebabkan bahwa perempuan memiliki perilaku yang lemah lembut, sedangkan laki-laki berperilaku lebih tegas dan jantan. Dalam sebuah organisasi, kedudukan perempuan dianggap tidak lebih unggul, menurut Moss (dalam Umar, 1999:57) menyatakan bahwa ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki lebih unggul, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih sering terjadi ketimpangan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya Ulfah (2010:17) juga mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan dipahami sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis agar perempuan mampu berkembang secara optimal dan mampu membuat rencana, mengambil inisiatif, mengorganisir diri, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya.

Kesadaran kritis tersebut hanya dapat dicapai apabila perempuan mampu melihat ke dalam diri mereka sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan.

Pemberdayaan perempuan sering digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan ekonomi individu, yang merupakan pra

syarat pemberdayaan. Penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan meliputi kegiatan yang mencakup bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, fasilitas atau bantuan sosial, termasuk di dalamnya pengembangan usaha ekonomi produktif, yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan dan keutuhan perempuan serta peningkatan pendapatan ekonominya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan sumber daya perempuan dapat digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan/*skill* (psikomotorik) dan mental (afektif) merupakan komponen yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Sedangkan faktor eksternal, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memberdayakan faktor-faktor internal.

Oleh karena itu, sangat penting bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan, mengasah keterampilan yang dapat mendukungnya untuk memberdayakan dirinya sendiri. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan pendidikan formal, informal dan nonformal. Menurut Kindervatter (dalam Ulfah, 2010: 20-21), dijelaskan empat pendekatan dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan luar sekolah, yaitu sebagai berikut *community organization*, yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka; *self management and collaboration*, yaitu pendekatan dengan sistem penyamarataan atau pembagian wewenang di dalam kegiatan; *participatory approaches*, yaitu pendekatan yang menekankan kepada keterlibatan setiap warga belajar dalam keseluruhan kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin serta tenaga-tenaga ahli setempat; dan *education for justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga belajar tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan.

Pendidikan nonformal untuk pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui kegiatan kewirausahaan. Keikutsertaan perempuan dalam program yang diselenggarakan diharapkan para perempuan dapat memiliki pemahaman dan keterampilan berwirausaha demi peningkatan pendapatan ekonominya.

3. Pandangan Teori Pendidikan Luar Sekolah

Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan keterbatasan pendidikan dalam menjangkau sistem pendidikan persekolahan dan kurang

berkembangnya kegiatan pendidikan luar sekolah yang terdapat di masyarakat. Oleh karena itu sangat didambakan akan kehadiran program-program pendidikan luar sekolah yang berbasis sosial budaya dan potensi alam sekitarnya untuk memberdayakan masyarakat.

Secara definitif pendidikan adalah usaha sengaja untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian manusia. Artinya, pendidikan terdiri dari; (1) pengelola pembelajaran, (2) warga belajar dan (3) tujuan pembelajaran, yaitu untuk menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, wawasan, ketrampilan, nilai, sikap, dan perilaku subyek didik itu sendiri (Rogers, 1993:20-21). Lebih lanjut Rogers (1993:25) menyatakan bahwa “*Non-formal education has been defined as all education provided outside of the formal system, whatever its purposes, target groups and providers*”. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah mencakup seluruh aktivitas pendidikan atau pembelajaran yang terorganisir di luar sistem persekolahan.

Pendidikan mengandung makna suatu proses yang menempatkan belajar sebagai inti dari aktivitasnya. Belajar berlangsung dalam diri masing-masing individu dan berlangsung sepanjang hidupnya sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya. Pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungan, selanjutnya menciptakan pengalaman belajar. Melalui pendidikan, belajar diselenggarakan secara terencana (*organized learning program*) demi memenuhi kebutuhan belajar yang diinginkan setiap warga belajar.

Karakteristik program pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Pendidikan luar sekolah diselenggarakan dengan sengaja untuk tujuan pendidikan (*organized learning program*). Sedangkan pendidikan informal relatif tidak terorganisasi dan tersistematis (Coombs, 1973:11). Pendidikan informal bukanlah suatu program yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pendidikan (*unorganized learning program*). Namun, lebih tepat diartikan sebagai peristiwa belajar yang terjadi pada diri seseorang, yang karena interaksi dengan lingkungannya membuat orang bersangkutan menjadi berubah pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap dan perilakunya .

Pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah terkategori sebagai *organized learning program*. Namun di antara keduanya pun memiliki perbedaan dalam pengorganisasiannya. Dalam pendidikan persekolahan, programnya terorganisasi dengan sangat ketat. Sementara pada pendidikan luar sekolah, programnya terorganisasi

dengan relatif longgar. Menurut Coombs (1973:11) keterorganisasian program pendidikan luar sekolah adalah berada di tengah-tengah antara pendidikan informal dan pendidikan persekolahan. Sebab, pendidikan informal cenderung tidak terorganisasi secara sistematis. Sementara pendidikan persekolahan terorganisasi dengan sistem pendidikan yang terstruktur mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah berbeda dengan pendidikan informal yang cenderung tidak terorganisasi dan tidak sistematis. Namun berbeda pula dengan pendidikan persekolahan yang terorganisasi secara ketat. Dalam penyelenggaraannya, program pendidikan luar sekolah dilakukan oleh berbagai penyelenggara, berbagai tujuan dan beraneka ragam karakteristik peserta program (Apps 1979:89-101).

Karakteristik program pemberdayaan masyarakat perempuan merupakan bentuk pendidikan dalam konteks pengembangan masyarakat. Boyle (1981) membagi tiga tipe program pendidikan luar sekolah yang terdiri dari *developmental*, *institutional* dan *informational*. *Developmental*, merupakan tipe program pendidikan luar sekolah yang memusatkan perhatian pada membantu atau memfasilitasi individu, masyarakat, kelompok dan komunitas dalam menentukan dan mengatasi masalah yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup (Moedzakir, 2010:221). Sejalan dengan itu, pemberdayaan perempuan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk program pendidikan luar sekolah dengan tipe *developmental*.

C. SIMPULAN

Perempuan umumnya telah terjebak dalam konstruksi sosial yang dibangun dengan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah lembut, sehingga perempuan hanya cocok bekerja sebagai ibu rumah tangga atau pekerja domestik seperti misalnya mencuci pakaian, memasak, mendidik anak dan melayani suami. Tugas ini umumnya dibebankan sepenuhnya kepada perempuan atau istri, sementara laki-laki dipandang sebagai makhluk yang kuat sehingga laki-laki cocok bekerja di bidang produksi dan laki-lakilah yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya, sehingga ketergantungan istri terhadap suami cukup tinggi.

Ketergantungan istri terhadap suami yang cukup tinggi biasanya disebabkan ketidakmampuan perempuan untuk mencari nafkah seperti laki-laki pada umumnya. Masalah perempuan adalah

akibat dari konstruksi sosial (*social contract*) yang sering menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender (Puspitawati, 2009:6).

Keluarga yang berhasil adalah ketika seorang ibu memperoleh tingkat pendidikan yang baik, memiliki akses publik yang luas, dan mempunyai posisi tawar yang kuat. Dengan keluasan pandangan itulah, seorang ibu akan mampu mendidik anak-anak mereka dengan cerdas dan bijaksana (Puspitawati, 2009:4).

Secara psikologis, perempuan membutuhkan aktualisasi diri demi pengembangan dirinya dan sesuatu yang pada akhirnya juga berdampak positif terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan pada umumnya. Pemerintah sebagai alat penggerak jalannya pembangunan dan berkembangnya sebuah daerah tergantung dari sejauh mana kecerdasan dan kreativitas pemerintah dalam memajukan daerahnya. Peranan perempuan disuatu daerah sangat penting, sehingga pemerintah daerah sebaiknya mempunyai kebijakan-kebijakan terhadap perempuan seperti memfasilitasi berbagai kepentingan perempuan dalam berkarya.

Upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi produktif perempuan. Harapannya adalah peningkatan pendapatan guna kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan posisi kaum perempuan menuju kesetaraan gender.

DAFTAR RUJUKAN

- APPEAL. 1996. *Pendidikan Berkelanjutan: Arah dan Kebijakan Baru*. Bangkok: Ditjen Diklusepora dan UNESCO
- Apps, JW. 1979. *Problems in Continuing Education*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Boyle, P.G. 1981. *Planning Better Programs*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Rogers, Alan. 1993. *Adult Learning for Development*. Cassel Educational Limited. Villiers House 41/47 Strand London.
- Ulfah. 2011. *Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Merajut (Studi Kasus Pelatihan Keterampilan di PKBM Bina Mandiri di Cipageran Cimahi Jawa Barat)*. Tesis: Tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Moedzakir, M.D. 2010. *Metode Pembelajaran untuk Program-Program Pendidikan Luar Sekolah*. Malang: UM Press.